



CATATAN RINGKAS

# Panggilan Aksi: Mitigasi Kerugian Sipil dalam Operasi Militer atau Polisi

Bagi Pemerintah, melindungi warga sipil dari dampak konflik dan kekerasan memiliki beberapa tujuan, termasuk dalam hal ini melindungi hak asasi manusia, memberikan keamanan sebagai layanan publik, dan mempertahankan legitimasi.

## Pendahuluan

Agar berhasil, pasukan keamanan – termasuk militer dan polisi – harus melindungi warga sipil dari kekerasan, meminimalkan bahaya dari operasi keamanan mereka sendiri, dan bertanggung jawab secara tepat atas perilaku mereka. Bahkan pemerintah yang paling berkomitmen pun menghadapi tantangan dalam melindungi warga sipil, baik di dalam wilayah mereka sendiri maupun di wilayah negara–negara lain, atau ketika berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

Kerugian dapat terjadi sebagai akibat dari pasukan yang kurang terlatih, kebijakan atau prosedur yang tidak memadai, bias bawaan, kurangnya informasi, atau hanya kebetulan selama operasi berlangsung. Walaupun mungkin pemerintah memiliki kemampuan untuk menyelidiki dugaan kejahatan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka tidak memenuhi elemen akuntabilitas lainnya, termasuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi dan memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang telah dirugikan. Di antara pelajaran terpenting yang dapat dipetik, pengembangan kebijakan perlindungan sipil yang efektif bergantung pada keterlibatan komunitas dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil, termasuk para pakar sipil, lembaga akademik, organisasi keagamaan, dan LSM, memiliki kekayaan pengalaman dan perspektif untuk prioritas dan kebutuhan yang harus diperhatikan dalam operasi keamanan.



Pada 22 Februari 2023, The Habibie Center, bekerjasama dengan Center for Civilians in Conflict, menyelenggarakan sebuah workshop yang melibatkan belasan ahli dan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk membahas perlindungan warga sipil. Tujuan workshop ini adalah mengidentifikasi berbagai prioritas paling penting, titik penekanan, dan peluang untuk memperkuat berbagai langkah guna memproteksi warga sipil dari kekerasan serta konflik bersenjata pada masa kini maupun masa depan. Dalam analisis yang disampaikan, para peserta merujuk pada keahlian, kerja-kerja riset, serta pengalaman masing-masing dalam konteks masa kini dan masa lampau. Kertas kerja ini meringkas beberapa poin utama yang harus ditindaklanjuti sebagai panggilan aksi.

## Konteks Perlindungan Warga Sipil di Indonesia:

Para peserta secara umum sepakat bahwa perlindungan warga sipil dalam konteks Indonesia berbeda secara signifikan dengan konteks lain, termasuk di dalamnya bagi mereka yang mengalami berbagai situasi konflik bersenjata secara lebih luas. Meski demikian, para peserta mengidentifikasi dua konteks relevan untuk membahas perlindungan warga sipil di Indonesia:



Suatu situasi di mana para kelompok bersenjata melawan kekuatan negara, dan ketika militer serta berbagai aparat keamanan lainnya melaksanakan berbagai operasi keamanan untuk mempertahankan otoritas negara. Kategori ini mencakup konflik di Papua.



Suatu situasi kekerasan antar komunitas atau kelompok, yang terkadang melibatkan berbagai kelompok vigilantisme (main hakim sendiri) atau gerakan terorganisir, dan seringkali disebabkan oleh friksi di antara berbagai kelompok keagamaan, budaya atau etnis. Kategori ini mencakup berbagai konflik lintas maupun internal keagamaan, termasuk beragam serangan langsung maupun tidak langsung pada kelompok minoritas keagamaan seperti komunitas Ahmadiyah dan Syiah.

Para peserta secara seksama memperhatikan bahwa berbagai konteks seringkali tumpang tindih, dan sangat mungkin untuk menemukan beragam kategori kekerasan pada lokasi yang sama. Sebagian risiko yang dialami oleh masyarakat dalam kedua konteks adalah ancaman kekerasan yang dilakukan oleh warga sipil lainnya (dan perlindungan tidak memadai dari aparat keamanan), serta berbagai risiko bahaya disebabkan oleh operasi pasukan keamanan, termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan dan bahkan pembunuhan ilegal. Para peserta menyoroti berbagai tren dan faktor tertentu yang menimbulkan risiko kekerasan terorganisir bagi masyarakat dalam beberapa konteks berikut ini:

- Sebagaimana ditemukan di negara lain, polisi kerap memilih karakteristik militer, seperti dalam penampilan dan pilihan peralatan dan persenjataan.
- Dalam beberapa konteks, pemerintah tidak mengklarifikasi kerangka hukum mana yang dipergunakan dalam berbagai operasi militer, hal ini juga berpengaruh terhadap bagaimana taktik dan prosedur operasi militer.
- Kekebalan aparat keamanan tetap menjadi sebuah hambatan baik untuk pengawasan secara memadai dan untuk akuntabilitas dari pihak militer dan kepolisian.
- Dalam banyak konteks, kepolisian tidak memiliki jumlah aparat yang cukup atau tidak hadir untuk menunjukkan otoritas guna mencegah kekerasan di antara berbagai kelompok komunitas maupun beragam serangan dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
- Di berbagai tempat di Indonesia, berbagai institusi keamanan milik pemerintah mungkin membantu beragam kepentingan bisnis atau korporasi dengan mengorbankan hak asasi manusia dan perlindungan sipil. Risiko kekerasan dan bahaya, yang diperparah oleh institusi keamanan pemerintah, dan kurangnya akuntabilitas; masih paling banyak terjadi pada industri ekstraktif.
- Secara khusus dalam konteks Papua, para ahli memberikan catatan bahwa kecenderungan pemerintah mengasosiasikan kelompok sipil tertentu (khususnya kelompok adat) sebagai “separatis” justru memperparah risiko bahaya untuk warga sipil.
- Dalam konteks Papua, risiko yang dialami warga sipil banyak dipengaruhi oleh durasi dari rotasi/penempatan TNI. Di satu sisi, jika rotasi terlalu lama, maka risiko korupsi, kelelahan, dan tekanan bagi kesehatan mental dapat meningkat di antara para prajurit (bersamaan dengan risiko serupa pada warga sipil). Di sisi lain, jika terlalu singkat, maka prajurit mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami berbagai kebutuhan dan kepentingan komunitas lokal; atau tidak memiliki motivasi untuk melindungi mereka dari bahaya.



- Militer terus mengerahkan prajurit dengan pangkat rendah atau kurang berkualitas, yang mungkin berdampak pada kemampuan dan profesionalisme mereka yang rendah ketika berurusan dengan warga sipil dan berbagai komunitas. Hal ini juga justru dapat meningkatkan risiko bahaya.
- Sejumlah hukum dan peraturan (bersama dengan penegakan hukum yang tidak merata) menciptakan semacam dasar semu bagi kelompok komunitas untuk menggunakan kekerasan, sebagaimana yang tampak pada Undang-Undang Penodaan Agama dan dalam hal penegakan (atau kurangnya penegakan) hukum atas hak milik.
- Para ahli menyoroti bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah perusahaan penyedia jasa keamanan, yang bersama dengan kelompok vigilantisme, dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah namun belum ada regulasi terukur maupun akuntabel terkait hal ini.
- Dalam konteks lain, pelatihan hak asasi manusia untuk polisi dan militer telah menjadi semacam latihan “centang kotak,” di mana aparat keamanan mungkin memiliki sebuah petunjuk hak asasi manusia atau mendapatkan berbagai instruksi dasar; tetapi kekurangan pelatihan praktis untuk mengintegrasikan perlindungan dan hak asasi manusia secara operasional.

Sementara itu, meskipun banyak perubahan terjadi di Indonesia yang dapat mengurangi risiko kekerasan, para ahli memberikan catatan bahwa di banyak tempat, beberapa pemicu konflik, seperti kesenjangan penghasilan, persaingan atas sumber daya alam, pengolahan sumber daya, pengusiran, kepemilikan tanah, keragaman budaya dan keagamaan, dan variabel kinerja, pelayanan, serta akuntabilitas berbagai institusi keamanan; masih tetap berlangsung. Beberapa faktor ini, bersama dengan fenomena dan peristiwa politik, sosial dan alam lainnya – seperti kepemimpinan Indonesia di ASEAN, pemilihan umum yang akan datang, dan berbagai efek perubahan iklim yang dahsyat – memunculkan kebutuhan dan kesempatan untuk segera mengembangkan sebuah agenda proaktif sehingga dapat melindungi warga sipil secara lebih baik dari kekerasan.

# Rekomendasi Kebijakan

- **Penempatan pasukan militer yang terlatih baik**  
Pemerintah Indonesia dan militer seharusnya memastikan bahwa prajurit berkualitas tinggi dan terlatih yang ditempatkan di Papua. Militer Indonesia seharusnya mengembangkan kapasitas untuk mengintegrasikan antara berbagai kebutuhan perlindungan warga sipil dan komunitas dalam operasinya, termasuk di dalamnya upaya memahami beragam preferensi komunitas lokal, mengurangi berbagai risiko dari konsekuensi dan tindak balasan yang tidak diharapkan; dengan menghormati berbagai kebutuhan komunitas lokal.
- **Meninjau ulang dan mengklarifikasi berbagai aturan dan memastikan kepatuhannya**  
Militer Indonesia seharusnya meninjau ulang dan mengklarifikasi berbagai aturan terkait penggunaan kekuatan, menyertakan aturan-aturan yang ada jika terjadi kontak (engagement), untuk memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan penekanan khusus pada upaya penanganan bahaya, termasuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran hak asasi manusia, dan ganti rugi yang dianggap memadai oleh budaya setempat.
- **Memahami berbagai risiko dan kerentanan**  
Pemerintah Indonesia seharusnya memahami berbagai risiko dan kerentanan dari kelompok keagamaan dan minoritas lainnya, dan memastikan sejumlah sumber daya yang memadai untuk mencegah dan menyelesaikan kekerasan serta menghindari dan mengurangi risiko bahaya.
- **Mendukung peran masyarakat sipil independen**  
Pemerintah Indonesia – dan militer – seharusnya menyambut dan mendukung peran masyarakat sipil independen dalam menumbuhkan serta meningkatkan relasi-relasi antara komunitas dengan pihak keamanan dalam pencegahan serta penyelesaian konflik. Pemerintah juga seharusnya menyambut bantuan internasional untuk hal yang sama.
- **Mengembangkan dan memberikan pelatihan praktis secara reguler**  
Militer dan kepolisian seharusnya mengembangkan dan memberikan pelatihan praktis secara reguler guna mengasah upaya perlindungan bagi warga sipil dan hak asasi manusia, khususnya pada satuan-satuan yang ditempatkan pada area di mana risiko bahaya untuk warga sipil cukup tinggi. Pemerintah Indonesia seharusnya bekerjasama dengan pemerintah negara lain dan organisasi terkemuka yang berpengalaman dalam bidang ini.

# Rekomendasi Kebijakan

- **Memperkuat pemahaman dan pengawasan terhadap berbagai institusi keamanan**  
Parlemen Indonesia dan badan pemantau lainnya seharusnya memperkuat pemahaman dan pengawasan terhadap berbagai institusi keamanan dan, secara khusus, apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk melindungi warga sipil dari kekerasan, dan risiko bahaya yang disebabkan oleh para aktor keamanan ketika menggunakan senjata. Jika perlu, parlemen dan badan pemantau lainnya seharusnya mengupayakan kerjasama transnasional serta pertukaran pengetahuan.
- **Mengembangkan dan menerapkan sebuah kebijakan perlindungan warga sipil yang komprehensif**  
Pemerintah Indonesia seharusnya mengembangkan dan menerapkan sebuah kebijakan perlindungan warga sipil yang komprehensif, yang sejalan dengan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal PBB, dengan mencari masukan dan keahlian dari masyarakat sipil dalam proses ini.
- **Meningkatkan upaya perlindungan warga sipil dan hak asasi manusia sebagai agenda politik**  
Para calon pemimpin dalam pemilu yang akan datang seharusnya memanfaatkan kesempatan kampanye untuk menunjukkan ide-ide untuk meningkatkan upaya perlindungan warga sipil dan hak asasi manusia.



The Habibie Center

**CENTER FOR  
CIVILIANS IN CONFLICT**

RECOGNIZE. PREVENT. PROTECT. AMEND.

Organisasi yang berpartisipasi:



CENTRE FOR  
STRATEGIC AND  
INTERNATIONAL  
STUDIES



THE CRIME PREVENTION PEOPLE™



